



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Lt.3-5

Jl. Jenderal A.Yani Kav. 58 Bypass Cempaka Putih Timur

Fax.021 29079197 /PO.BOX 1148 JKT 13011 JAT

Jakarta, 26 Mei 2020

Nomor : 437/DJU.1/KU.01/5/2020
Lampiran : I (satu) lampiran
Perihal : Pemberitahuan Peralihan Koordinator Wilayah DIPA 005.03
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Kepada Yth:

1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
(Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan adanya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247/SE/SK/V/2020 Tanggal 22 Mei 2020 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03), bahwa dalam Surat Keputusan terdapat peralihan beberapa Koordinator Wilayah DIPA 005.03 yang sebelumnya berada pada Pengadilan Tingkat Pertama dialihkan ke Pengadilan Tingkat Banding (Daftar Terlampir), oleh karena itu untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan dan menyelenggarakan sistem akuntansi pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan secara akurat dan akuntabel perlu dibuat Berita Acara Serah Terima dari Koordinator Wilayah Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan surat pemberitahuan ini atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Drs. Wahyudin, M.Si.

Nip. 19630509 198303 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Kepada Yth :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya
6. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7. Sekretaris Pengadilan Tinggi Manado
8. Sekretaris Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi Kendari
10. Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar
11. Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram
12. Sekretaris Pengadilan Tinggi Ternate
13. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten
14. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
15. Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo
16. Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru
17. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura
18. Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya
19. Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi
20. Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang
21. Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak
22. Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya
23. Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin
24. Sekretaris Pengadilan Negeri Manado
25. Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang
26. Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari
27. Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar
28. Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram
29. Sekretaris Pengadilan Negeri Ternate
30. Sekretaris Pengadilan Negeri Serang
31. Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
32. Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo
33. Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
34. Sekretaris Pengadilan Negeri Manokwari
35. Sekretaris Pengadilan Negeri Mamuju

Lampiran I
 Surat Sekretaris Direktorat
 Jenderal Badan Peradilan Umum
 Nomor :437 /DJU.1/ KU.01/5/2020
 Tanggal : 26 Mei 2020

Daftar Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran / Barang Wilayah
 (UAPPA / B-W)

No	Wilayah / Satuan Kerja UPT lama	Wilayah / Satuan Kerja UPT baru
1	Jawa Timur Pengadilan Negeri Surabaya	Jawa Timur Pengadilan Tinggi Surabaya
2	Jambi Pengadilan Negeri Jambi	Jambi Pengadilan Tinggi Jambi
3	Sumatera Selatan Pengadilan Negeri Palembang	Sumatera Selatan Pengadilan Tinggi Palembang
4	Kalimantan Barat Pengadilan Negeri Pontianak	Kalimantan Barat Pengadilan Tinggi Pontianak
5	Kalimantan Tengah Pengadilan Negeri Palangkaraya	Kalimantan Tengah Pengadilan Tinggi Palangkaraya
6	Kalimantan Selatan Pengadilan Negeri Banjarmasin	Kalimantan Selatan Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7	Sulawesi Utara Pengadilan Negeri Manado	Sulawesi Utara Pengadilan Tinggi Manado
8	Sulawesi Selatan Pengadilan Negeri Ujung Pandang	Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
9	Sulawesi Tenggara Pengadilan Negeri Kendari	Sulawesi Tenggara Pengadilan Tinggi Kendari
10	Bali Pengadilan Negeri Denpasar	Bali Pengadilan Tinggi Denpasar
11	Nusa Tenggara Barat Pengadilan Negeri Mataram	Nusa Tenggara Barat Pengadilan Tinggi Mataram
12	Maluku Utara Pengadilan Negeri Ternate	Maluku Utara Pengadilan Tinggi Ternate
13	Banten Pengadilan Negeri Serang	Banten Pengadilan Tinggi Banten
14	Bangka Belitung Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	Bangka Belitung Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

15	Gorontalo Pengadilan Negeri Gorontalo	Gorontalo Pengadilan Tinggi Gorontalo
16	Kepulauan Riau Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Riau & Kepulauan Riau Pengadilan Tinggi Pekanbaru
17	Papua Barat Pengadilan Negeri Manokwari	Papua & Papua Barat Pengadilan Tinggi Jayapura
18	Sulawesi Barat Pengadilan Negeri Mamuju	Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal Mei 2020, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri.....

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan

Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 247 Tahun 2020 Tanggal 22 Mei 2020 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03), Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan SAI UAPPA/B-W
(isi dengan nama wilayah) kepada Pihak Kedua.

Bersama ini juga diserahkan:

1. Arsip Data Komputer (*Back-up*) SAIBA dan SIMAKBMN *Audited* Tahun 2019 seluruh satuan kerja
2. Daftar Data Akrual seluruh Satuan Kerja per 31 Desember 2019
3. Laporan Keuangan UAPPA/B-W Tahun 2019
4. Dokumen Pendukung Laporan Keuangan (yang ada pada Laporan Keuangan UAPPA/B-W Tahun 2019):
 - a. Daftar Saldo Kas Dibendahara Pengeluaran dan Dokumen Sumber
 - b. Daftar Saldo Kas Dibendahara Penerimaan dan Dokumen Sumber
 - c. Daftar Saldo Kas Lainnya Dibendahara Pengeluaran dan Dokumen Sumber
 - d. Daftar Saldo Piutang PNBPN dan Piutang Lainnya dan Dokumen Sumber
 - e. Daftar Saldo Pendapatan Diterima Dimuka dan Dokumen Sumber
 - f. Daftar Rekening Pemerintah
 - g. Monitoring Penutupan Rekening Pemerintah
 - h. Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga
 - i. Daftar penjelasan kondisi yang tidak wajar.
5. Data dan Dokumen lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi UAPPA/B-W (dapat diserahkan kemudian).

Fungsi pengelolaan SAI UAPPA/B-W termasuk dan tidak terbatas pada:

1. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala, dan
3. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan berupa Laporan Keuangan UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03) Triwulan I, Laporan Keuangan Semester I, Laporan Keuangan Triwulan III, dan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Keuangan pada Periode yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pihak Pertama
Sekretaris
Pengadilan Negeri

Pihak Kedua
Sekretaris
Pengadilan Tinggi

.....
NIP

.....
NIP



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 247/SEK/SK/V/2020

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
WILAYAH (UAPPA/B-W) DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DIPA) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG (005.03)**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan SAI yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dan sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 maka perlu dibentuk Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03);
- b. bahwa Jabatan-Jabatan Struktural yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Mengelola SAI UAPPA/B-W DIPA Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

- Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Keuangan Negara/Lembaga;
 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

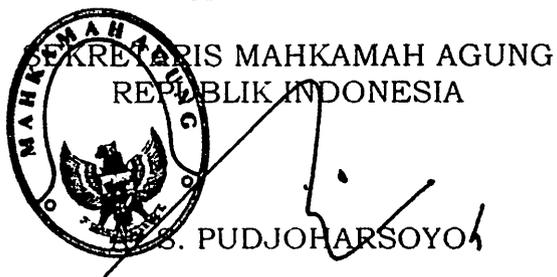
MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENGELOLA SAI UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03).
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Jabatan-Jabatan Struktural yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola SAI

- UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03).
- KEDUA : Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - b. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala; dan
 - c. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan berupa Laporan Keuangan UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03) Triwulan I, Laporan Keuangan Semester I, Laporan Keuangan Triwulan III, dan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Keuangan pada Periode yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03) bertanggungjawab kepada masing-masing Sekretaris Pengadilan.
- KEEMPAT : Menetapkan Pengelola SAI yang tercantum dalam lampiran I diberikan honorarium sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA UAPPA/B-W DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2020



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 247 /SEK/SK/V/2020

TANGGAL : 22 Mei 2020

TIM PENGELOLA SAI UAPPA/B-W
DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG (005.03)

No.	Wilayah/Satuan Kerja UPT	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelolaan SAI
1	DKI Jakarta PT Jakarta	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
2	Jawa Barat PT Bandung	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
3	Jawa Tengah PT Semarang	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
4	DI Yogyakarta PT Yogyakarta	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
5	Jawa Timur PT Surabaya	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
6	Aceh PT Banda Aceh	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
7	Sumatera Utara PT Medan	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua

No.	Wilayah/Satuan Kerja UPT	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelolaan SAI
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
8	Sumatera Barat PT Padang	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
9	Riau & Kepulauan Riau PT Pekanbaru	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
10	Jambi PT Jambi	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
11	Sumatera Selatan PT Palembang	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
12	Lampung PT Tanjung Karang	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
13	Kalimantan Barat PT Pontianak	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
14	Kalimantan Tengah PT Palangkaraya	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
15	Kalimantan Selatan PT Banjarmasin	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
16	Kalimantan Timur & Kalimantan Utara PT Samarinda	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua

No.	Wilayah/Satuan Kerja UPT	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelolaan SAI
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
17	Sulawesi Utara PT Manado	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
18	Sulawesi Tengah PT Palu	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
19	Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat PT Ujung Pandang	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
20	Sulawesi Tenggara PT Kendari	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
21	Maluku PT Ambon	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
22	Bali PT Denpasar	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
23	Nusa Tenggara Barat PT Mataram	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
24	Nusa Tenggara Timur PT Kupang	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
25	Papua dan Papua Barat PT Jayapura	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua

No.	Wilayah/Satuan Kerja UPT	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelolaan SAI
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
26	Bengkulu PT Bengkulu	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
27	Maluku Utara PT Ternate	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
28	Banten PT Banten	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
29	Bangka Belitung PT Bangka Belitung	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN
30	Gorontalo PT Gorontalo	Sekretaris	Penanggung Jawab
		Kabag. Umum & Keuangan	Koordinator
		Kasubbag. Keuangan & Pelaporan	Ketua
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SAK
		Staf Subbag. Keuangan & Pelaporan	Petugas SIMAKBMN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUDJOHARSOYO